**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERSIDANGAN
SECARA *ONLINE* BERDASARKAN PASAL 1 ANGKA 12
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA
PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI CIAMIS)**

Sinta Sintiani^{*)}

sintaeverything@gmail.com

R. Yenni Muliani^{*)}

r.yennimuliani65@gmail.com

Yuliana Surya Galih^{*)}

Yuge71@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted to provide an explanation related to online trials which were conducted when there was a Covid-19 pandemic in Indonesia, where the implementation was not in accordance with the Criminal Procedure Code. The research method used in this research is descriptive analytical method. By using a normative juridical approach. The sources of research materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The analytical method used in compiling data and research in writing this thesis is the method of deduction, namely the method of investigation based on general principles to explain specific events or from general theories to concrete facts. This study aims to find out and analyze.

Keywords: Trial, Online, Criminal case

^{*} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan penjelasan terkait dengan persidangan secara online yang dilakukan ketika saat ada pandemi covid-19 di Indonesia yang dimana pelaksanaannya ada yang tidak sesuai didalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber bahan penelitian yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode analisis yang digunakan dalam menyusun data dan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah metode deduksi yaitu metode penyelidikan didasarkan pada asas-asas yang bersifat umum untuk menerangkan peristiwa yang bersifat khusus atau dari teori yang bersifat umum terhadap fakta-fakta yang bersifat konkrit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa.

Kata Kunci : Persidangan, Online, Perkara pidana

I. Pendahuluan

Covid-19 secara global telah memakan banyak korban, tak terkecuali di Indonesia. Penyebarannya yang begitu cepat, telah menimbulkan lonjakan yang terpapar virus, dan angka kematian pun menunjukkan lonjakan yang tinggi. Salah satu upaya untuk menekan angka penyebaran *Covid-19* adalah dengan melakukan pembatasan sosial. Pembatasan sosial dimaksudkan untuk meminimalisir penyebaran virus, agar penyebaran virus tersebut tidak semakin meluas.

Pandemi ini juga berdampak pada bidang ekonomi, sosial, budaya, politik serta bidang *lainnya* termasuk pada bidang hukum. Dalam bidang hukum ini terdampak pada sebuah persidangan dimana semua orang harus bekerja dirumah tidak terkecuali aparat penegak hukum dan perangkat pengadilan. Penerapan *social distancing*, berdampak kepada pembatasan bergerak, terutama di ruang tertutup. Sebagai solusi terhadap pembatasan sosial tersebut adalah dengan melakukan aktivitas secara

online, baik itu untuk kepentingan berinteraksi social, belanja maupun bekerja. Penggunaan sistem *online* ini juga berlaku didalam persidangan.

Persidangan yang selama ini dilakukan diruang sidang pengadilan, terutama persidangan perkara pidana, sekarang tidak dapat lagi dilakukan diruang sidang melainkan melalui media elektronik atau disebut juga persidangan yang *dilakukan* secara *online*. Hal ini menyebabkan perangkat pengadilan harus memulai aktivitas yang tidak biasa, karena harus menggantungkan diri kepada teknologi untuk menunjang keberlangsungan penegakan hukum bagi para pencari keadilan. Pemanfaatan secara maksimal sistem *E-court* yang sudah berjalan sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik saat ini telah menjadi solusi bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pencari keadilan tidak hadir di pengadilan secara langsung. Pemanfaatan *E-court* ini pada akhirnya bermuara pada pentingnya penerapan *Virtual Courts* yang diadakan secara daring tanpa perlu menghadirkan para pihak di ruang persidangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai Hukum Acara, tidak mengatur tentang persidangan secara online, karena ketika Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diberlakukan, teknologi Informasi belum dikenal pada waktu itu, dan keadaan pandemi seperti sekarang ini, tidak terpikirkan akan terjadi, sehingga hukum acara pidana mengatur bahwa persidangan harus dilakukan secara langsung, tatap muka dan semua hadir di ruang sidang.

Menurut Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 pengertian *persidangan* secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, Mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh

Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi audio visual dan sarana elektronik lainnya.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang dihadapi dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan data, klarifikasi data dan analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif (Winarno: 1989:2). Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder yang berupa hukum positif (Soerjono Soekanto: 1995:13).

III. Hasil dan Pembahasan

Pengadilan Negeri Ciamis merupakan Pengadilan Negeri yang beralamat di Jalan. Jenderal Soedirman Nomor. 116 Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Pengadilan Negeri Ciamis memiliki Visi dan Misi "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung." dan Misi yaitu Menjaga kemandirian badan peradilan; Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan; Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; dan Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Persidangan secara elektronik sebenarnya sudah tidak asing didalam tatanan hukum di indonesia. Karena Persidangan secara elektronik sudah mulai dilakukan dengan modern tanpa harus melakukan sidang di ruang pengadilan. Di Indonesia sendiri persidangan secara online sudah dilakukan dalam hukum perdata , hukum perdata agama dan hukum tata usaha negara. Pemanfaatan secara maksimal sistem E-court yang sudah berjalan sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara

Elektronik saat ini telah menjadi solusi bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pencari keadilan tidak hadir di pengadilan secara langsung. Pemanfaatan E-court ini pada akhirnya bermuara pada pentingnya penerapan Virtual Courts yang diadakan secara daring tanpa perlu menghadirkan para pihak di ruang persidangan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa awal mula terjadinya persidangan online ini adalah dampak yang harus dihadapi saat ini karena adanya suatu pandemik dengan mewabahnya virus corona. Maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengkhawatirkan akan adanya penyebaran virus yang menyerang para penghuni Lembaga Kemasyarakatan. Maka dari itu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengusulkan bahwa tidak ada kunjungan kedalam Lembaga Pemasyarakatan. Bahkan terdakwa yang akan bersidang di pengadilan tidak boleh keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Maka dari itu Mahkamah Agung membuat terobosan dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Didalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut memuat prosedur untuk melakukan persidangan secara elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung ini memperbolehkan bersidang secara online dengan menggunakan fasilitas elektronik sehingga terdakwa tetap berada dilapas sedangkan hakim dan pihak yang lain bisa bersidang di satu ruang sidang. Jadi dilaksanakan dimasing masing tempat jika memiliki fasilitas jika penuntut umum tidak memiliki fasilitas maka bisa bersidang di pengadilan. Namun pada faktanya persidangan yang dilakukan secara online ini tidak diatur didalam Kiab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melakukan observasi lapangan di Pengadilan Negeri Ciamis terdapat beberapa kendala dalam persidangan secara elektronik diantaranya :

1. Adanya ketidak jelasan suara hakim dari monitor saksi yang berada diluar kota;
2. Tidak adanya kesiapan dari saksi terkait dengan alat sumpah dan tidak adanya pihak lain yang akan memegang alat sumpah;
3. Saksi tidak mengerti prosedur sumpah yang dilakukan dalam persidangan online;
4. Adanya koneksi yang tidak stabil sehingga video macet dan suara tidak ada;
5. Sulitnya penasihat hukum bertemu dengan terdakawa di rutan/lapas karena lapas tidak memberikan izin temu;
6. Microfon yang tidak berfungsi sehingga tidak terdengar di zoom saksi ahli;

Ketentuan asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan eksistensinya tampak pada Penjelasan umum angka 3 huruf e KUHAP yang menyatakan bahwa : Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus ditetapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

Asas terbuka untuk umum merupakan Persidangan terbuka untuk umum atau masyarakat boleh hadir dalam persidangan dipengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum tersebut kecuali dalam kasus kesusilaan atau yang terdakwanya merupakan anak-anak umum harus dilaksanakan dalam setiap persidangan perkara pidana kecuali perkara kesusilaan dan perkara yang terdakwanya anak-anak. Hal ini bertujuan agar semua persidangan pengadilan jelas, terang dilihat dan diketahui oleh masyarakat. Tidak boleh ada persidangan yang berbisik-bisik.

Menurut asas peradilan terbuka untuk umum tidak terpenuhi dimana masyarakat yang ingin melihat persidangan tidak bisa masuk kedalam persidangan online yang dilaksanakan karena dalam persidangan secara online ini masyarakat perlu mendapatkan kode untuk bisa melihat perkara yang sedang berlangsung. Pengadilan belum bisa memberikan kode tersebut. Yang dimana hal ini bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Upaya dalam mengatasi kendala dalam persidangan secara elektronik harus dilakukan oleh berbagai pihak diantaranya pemerintah, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Pengadilan. Upaya pemerintah yaitu dengan menyiapkan sarana untuk persidangan online. Selanjutnya upaya dari kejaksaan dan lapas yang harus berkoordinasi dengan baik supaya pengalihan orang yang bermasalah dengan hukum atau terdakwa bisa hadir tepat waktu dalam persidangan. Serta dalam menambah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan yang paling penting adalah pemerintah harus segera menambahkan pasal-pasal yang berkaitan dengan sidang pidana secara online kedalam Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan persidangan secara online berdasarkan pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik merupakan peraturan pelaksana dari kekuasaan kehakiman. Hal ini pelaksanaan persidangan online dilakukan melalui layar komputer yang terhubung dalam internet

dimana Hakim berada di ruang sidang pengadilan, Jaksa Penuntut umum berada di Kantor Kejaksaan dan Terdakwa berada di Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan yang dengan atau tidak didampingi penasihat hukumnya.

2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan persidangan secara online diantaranya kendala teknis yang berhubungan dengan sarana dan prasarana yang tidak memadai serta kualitas jaringan yang bermasalah. Kurangnya koordinasi yang terjadi antara aparat penegak hukum terkait dengan pelimpahan berkas maupun dalam upaya menghadirkan terdakwa. Tidak adanya akses penasihat hukum untuk bertemu dengan terdakwa selain di ruang sidang elektronik. Sumber daya manusia yang tidak banyak dan kurang berkualitas yang mengerti tentang teknologi informasi yang kian modern serta adanya kendala di Lembaga Pemasyarakatan ketika persidangan secara online dilakukan tidak ada ruangan khusus untuk melakukan persidangan.
3. Upaya dalam mengatasi kendala dalam persidangan secara elektronik harus dilakukan oleh berbagai pihak diantaranya pemerintah, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Pengadilan. Upaya pemerintah yaitu dengan menyiapkan sarana untuk persidangan online. Selanjutnya upaya dari kejaksaan dan lapas yang harus berkoordinasi dengan baik supaya pengalihan orang yang bermasalah dengan hukum atau terdakwa bisa hadir tepat waktu dalam persidangan. Serta dalam menambah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

4.2. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian skripsi ini, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk pemerintah agar menambahkan pasal terkait persidangan online dalam Undang-Undang tersebut dalam arti lain Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 harus ada perubahan karena hukum yang bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman maka harus diatur tentang persidangan pidana secara elektronik dalam undang-undang tersebut.
2. Untuk Aparat penegak hukum penulis menyarankan agar dapat berkoordinasi dengan baik dalam persidangan secara online ini agar bisa terlaksana dengan baik. Dan kepada sumber daya manusia yang telah bekerja di lingkungan pengadilan,kejaksaan dan Lapas agar memperbaiki kendala yang banyak terjadi akibat gangguan teknis.
3. Untuk pengadilan penulis sarankan untuk menambahkan atau merekrut sumberdaya manusia yang berkualitas yang mampu dan mengetahui tentang teknologi dan informasi sehingga apabila terdapat berbagai kendala teknis, pengadilan mampu mengatasi kendala tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Soekanto, Soerjono. 1995. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Interpratama.
- Surachmad, Winarno. 1989. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito.
- Adrisman, Tri. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila.
- Harahap, Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Rusly. 2013. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Yesmil, Anwar, dan Adang. (2009). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Padjadjaran.

B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.